



Antara Luka Lama dan Harapan Baru: Persepsi Masyarakat Ambon terhadap Konflik dan Harmoni

Jean Alicia Salhuteru¹, Yance Zadrak Rumahuru², Samel Sopakua³

Institut Agama Kristen Negeri Ambon

Received: 2 Mei 2025
Revised: 20 Mei 2025
Accepted: 29 Mei 2025

Abstract

Ambon dikenal sebagai kota dengan kekayaan budaya dan keberagaman etnis serta agama yang hidup berdampingan secara historis. Namun, harmoni tersebut pernah runtuh akibat konflik sosial yang terjadi pada tahun 1999–2002, meninggalkan luka mendalam secara fisik, sosial, dan psikologis. Sejak itu, berbagai upaya pemulihan telah dilakukan melalui rekonsiliasi berbasis budaya lokal seperti *Pela Gandong*, serta kerja sama lintas agama. Meski demikian, ketegangan sosial masih sesekali muncul, menunjukkan bahwa perdamaian belum sepenuhnya kokoh.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana masyarakat Ambon memaknai pengalaman konflik masa lalu dan membangun harapan terhadap masa depan yang harmonis. Dengan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap masyarakat dari berbagai latar belakang. Hasil penelitian menunjukkan adanya dinamika persepsi yang mencerminkan perasaan trauma, harapan, dan komitmen terhadap perdamaian. Faktor-faktor seperti pengalaman konflik, pendidikan, kondisi sosial-ekonomi, dan peran agama memengaruhi cara masyarakat menilai harmoni saat ini. Temuan ini menunjukkan bahwa pembangunan perdamaian pascakonflik perlu mempertimbangkan persepsi dan kebutuhan riil masyarakat di tingkat akar rumput.

Keywords: *Konflik ambon, trauma kolektif, rekonsiliasi, pela gandong, harmoni sosial.*

(*) Corresponding Author: Jeanalicia2003@gmail.com

How to Cite: Salhuteru, J., Rumahuru, Y., & Sopakua3S. (2025). Antara Luka Lama dan Harapan Baru: Persepsi Masyarakat Ambon terhadap Konflik dan Harmoni. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(5.C), 298-305. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12392>

Pendahuluan

Kota Ambon merupakan salah satu daerah di Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya, etnis, dan agama. Komunitas masyarakat Ambon terdiri dari berbagai suku bangsa seperti Ambon, Kei, Seram, Bugis, dan suku-suku lainnya, serta menganut berbagai agama seperti Islam, Kristen Protestan, Katolik, dan kepercayaan lokal. Keberagaman ini telah menjadi kekuatan budaya yang memperkaya kehidupan sosial masyarakat. Tradisi seperti *Pela Gandong*, yang mengajarkan nilai-nilai persaudaraan dan solidaritas lintas komunitas, menjadi contoh nyata bagaimana keragaman dapat dikelola secara positif (Nugroho, Y. 2020; Hidayah & Latumahina, 2022; Sibarani, 2023).

Namun, sejarah mencatat bahwa keberagaman tersebut juga pernah mengalami tantangan serius. Konflik sosial yang terjadi di Ambon pada periode 1999–2002 meninggalkan luka yang dalam, baik secara fisik, sosial, maupun psikologis (LIPI, 2025; Manuhutu & Idrus, 2022). Konflik ini menimbulkan korban jiwa, kehancuran infrastruktur, serta retaknya hubungan antar komunitas yang sebelumnya hidup berdampingan. Dampak konflik tersebut tidak hanya



dirasakan pada masa itu, tetapi juga berlanjut dalam bentuk trauma kolektif dan kerentanan sosial hingga hari ini (ICG, 2020; Siregar, 2023).

Setelah masa konflik, berbagai upaya dilakukan untuk memulihkan kehidupan sosial di Ambon. Revitalisasi nilai-nilai tradisional seperti Pela Gandong, inisiatif-inisiatif lintas agama, serta program-program rekonsiliasi dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil menjadi bagian dari usaha untuk membangun kembali tatanan sosial yang harmonis. Meski demikian, dalam kenyataannya, proses menuju harmoni tidak berjalan secara linier (Toisuta & Hetharie, 2024; Wattimena & Sibarani, 2023).

Berbagai studi sebelumnya telah membahas rekonsiliasi di Ambon, seperti peran agama (Bartels, 2003), budaya lokal (Pattinama, 2012), dan segregasi spasial (Latuharhary, 2021). Namun, belum banyak yang menyoroti secara mendalam bagaimana persepsi masyarakat biasa terhadap konflik masa lalu dan makna harmoni hari ini. Padahal, persepsi masyarakat adalah kunci dalam membentuk dinamika sosial pasca-konflik (Rahail & Titaley, 2022; Rumahlewang, 2024).

Hingga kini, masih sering muncul insiden-insiden kecil yang berpotensi memicu ketegangan antar komunitas, baik karena kesalahpahaman, ketidaksetaraan sosial-ekonomi, maupun perbedaan identitas. Hal ini menunjukkan bahwa membangun harmoni di tengah keberagaman memerlukan usaha yang berkelanjutan, bukan hanya sekadar mengandalkan memori kolektif akan perdamaian (Damar & Salampessy, 2023; Fadjar, 2022).

Namun, hubungan ini belakangan terganggu akibat terjadinya ketegangan antara kedua desa. Pada 31 Maret 2025, sebuah insiden penganiayaan terjadi di Dusun Salameti, Negeri Tial, yang melibatkan pemuda dari Tulehu dan Tial. Insiden tersebut menyebabkan seorang warga Tial mengalami luka serius dan harus dilarikan ke rumah sakit. Bentrokan antar pemuda dari kedua desa ini juga mengakibatkan seorang warga Tulehu tewas dan dua lainnya terluka (tribrataneews.maluku.polri.go.id). Sebagai respons, polisi telah menetapkan dua tersangka, yaitu NL dan SL, yang diduga terlibat dalam penganiayaan tersebut. Ketegangan antara kedua desa tersebut berlanjut dengan aksi protes dari warga Tial yang memblokir jalan sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap proses hukum yang berjalan (ambon.antaranews.com).

Peristiwa ini menunjukkan bahwa meskipun nilai-nilai tradisional seperti Pela Gandong masih ada, perbedaan sosial-ekonomi, perasaan ketidakadilan, dan ketegangan yang belum terselesaikan dapat memicu kekerasan di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk menggali bagaimana masyarakat Ambon memaknai konflik masa lalu dan apa yang dapat dilakukan untuk mengembalikan harmoni sosial yang sempat retak (Wattimena & Sibarani, 2023; Hetharie, 2024).

Dalam situasi ini, menjadi sangat penting untuk menggali bagaimana masyarakat Ambon hari ini memaknai konflik masa lalu dan bagaimana mereka membangun harapan baru untuk kehidupan sosial yang lebih harmonis. Persepsi masyarakat terhadap "luka lama" dan "harapan baru" menjadi kunci untuk memahami dinamika sosial yang tengah berlangsung. Apakah masyarakat masih dibayangi oleh trauma konflik? Ataukah mereka sudah mampu membangun kehidupan bersama yang lebih damai? Faktor-faktor seperti latar belakang

pendidikan, pengalaman sejarah, peran agama, dan kondisi sosial-ekonomi turut membentuk cara pandang ini (Toisuta, 2024; Rahardjo, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi masyarakat Ambon tentang hubungan antara pengalaman konflik masa lalu dan kondisi harmoni saat ini. Dengan memahami persepsi ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai realitas sosial masyarakat Ambon, serta memberikan dasar bagi penyusunan strategi pembangunan sosial yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat setempat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Menurut John W. Creswell (2016), penelitian kualitatif bersifat eksploratif dan bertujuan untuk memahami makna subjektif yang dibangun oleh individu berdasarkan pengalaman mereka. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menelusuri dan mengeksplorasi persepsi masyarakat Ambon terhadap konflik masa lalu dan harmoni sosial yang terbentuk setelahnya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan masyarakat dari berbagai latar belakang, observasi partisipatif terhadap praktik sosial lintas komunitas, serta dokumentasi dari sumber-sumber seperti arsip media dan laporan organisasi sipil. Data yang diperoleh kemudian direduksi, dianalisis secara tematik, dan disimpulkan sesuai dengan prosedur analisis kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994). Untuk menjaga validitas data, dilakukan triangulasi sumber dan member check. Penelitian ini juga menjunjung tinggi etika penelitian dengan memperoleh persetujuan dari informan serta menjaga kerahasiaan identitas mereka.

Pembahasan

1. Memori Kolektif dan Pola Interaksi Pascakonflik

Konflik Ambon telah membentuk apa yang disebut Maurice Halbwachs sebagai *memori kolektif*, yakni ingatan sosial yang diwariskan antar generasi melalui narasi keluarga dan komunitas. Wawancara menunjukkan bahwa memori konflik menjadi penghalang terbentuknya kepercayaan lintas kelompok. Ketakutan ini memengaruhi pola interaksi, di mana komunitas cenderung bergaul dalam lingkup homogen.

Teori Halbwachs menekankan bahwa memori bukan hanya pengalaman pribadi, tetapi dibentuk dan dipertahankan dalam kerangka sosial (Halbwachs, 1992). Ini terlihat dalam pengakuan warga Galala yang membatasi pergaulan anak dengan alasan keamanan berbasis memori konflik.

Fenomena ini juga mengarah pada pembentukan *boundary maintenance* (Barth, 1969), yakni proses mempertahankan batas identitas kelompok melalui pemisahan ruang sosial.

Sebagian besar informan menyatakan bahwa konflik yang terjadi pada tahun 1999–2002 masih meninggalkan luka yang membekas, baik dalam bentuk trauma pribadi maupun trauma kolektif. Seorang informan, Ibu J (58 tahun), warga Batu Merah, mengatakan:

“Beta seng bisa lupa saat rumah dibakar, suara tangis anak-anak, dan terpaksa mengungsi di hutan selama berhari-hari. Sekarang sudah aman, tapi rasa takut itu masih ada kalau ada keributan kecil.”

Memori kekerasan tersebut masih aktif dalam ingatan masyarakat dan memengaruhi cara mereka berinteraksi lintas komunitas. Beberapa warga menyatakan masih merasa waspada ketika melewati wilayah-wilayah tertentu yang dulu menjadi basis kelompok berbeda. Temuan ini menguatkan argumen bahwa trauma sosial tidak berakhir dengan gencatan senjata, melainkan membutuhkan waktu dan ruang pemulihan yang panjang (Bar-Tal, 2007).

2. Perbedaan Persepsi Antargenerasi

Dalam masyarakat pascakonflik, terjadi pergeseran persepsi antar generasi terhadap kekerasan masa lalu. Teori *generational consciousness* dari Mannheim (1952) menyebutkan bahwa generasi yang mengalami peristiwa besar memiliki kerangka pikir berbeda dari generasi sesudahnya. Generasi tua di Ambon masih dibayangi trauma, sedangkan generasi muda mulai mengembangkan narasi baru tentang kebersamaan.

Misalnya, pemuda dari Tulehu menyebut bahwa bermain sepak bola dengan teman yang berbeda agama bukan masalah, meski orang tuanya masih mengingat luka masa lalu.

Namun, dominasi narasi lama tetap menjadi tantangan dalam upaya pembaruan identitas kolektif.

3. Makna Harmoni dalam Perspektif Masyarakat

Harmoni tidak selalu dipahami sebagai ketiadaan konflik, melainkan sebagai kemampuan untuk hidup berdampingan meskipun ada perbedaan. Informan bernama Pak R (43 tahun), tokoh pemuda di Kelurahan Silale, menyatakan:

“Dorang bilang kita sudah damai, tapi menurut beta damai itu bukan berarti seng ada masalah, tapi kita bisa bicara baik-baik kalau ada beda.”

Makna harmoni dalam konteks masyarakat Ambon lebih bersifat praktis dan relasional. Mereka mengaitkannya dengan hidup saling menghormati, menjaga komunikasi, serta adanya toleransi dalam aktivitas sosial sehari-hari. Hal ini mencerminkan nilai-nilai lokal seperti *masohi* (gotong royong) dan Pela Gandong yang masih dijadikan acuan, walaupun tidak selalu diterapkan secara formal.

4. Peran Agama dan Tokoh Adat dalam Proses Rekonsiliasi

Peran agama dan tokoh adat sangat signifikan dalam membangun kembali jembatan antar komunitas. Beberapa informan menyebut bahwa kegiatan lintas iman seperti doa bersama, perayaan hari besar secara terbuka, dan diskusi antar tokoh agama telah membantu mencairkan ketegangan. Pendeta A dan Ustaz H yang ditemui dalam wawancara mengungkapkan:

“Setelah konflik, gereja dan masjid harus bersatu. Kami adakan pertemuan rutin, bukan hanya soal ibadah, tapi juga kegiatan sosial.”
“Beta rasa kalau pemuda-pemudi diajak kerja sama lewat kegiatan agama, dorang bisa lebih dekat lagi.”

Hal ini sejalan dengan penelitian Bartels (2003) yang menekankan pentingnya pendekatan lintas agama dalam membangun perdamaian di Maluku.

5. Pela Gandong: Simbol atau Realitas?

Beberapa komunitas masih menjunjung tinggi Pela Gandong sebagai simbol persaudaraan antar negeri. Namun, sebagian lainnya merasa bahwa nilai tersebut kini lebih bersifat simbolis dan kurang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu informan muda, Yopi (23 tahun), mengatakan:

“Orang tua-tua masih cerita tentang Pela Gandong, tapi di generasi kami, sudah jarang ada kegiatan nyata. Beta rasa kita butuh lebih dari sekadar simbol.”

Pela Gandong masih dianggap sebagai warisan budaya yang penting, tetapi perlu diaktualisasikan secara kontekstual dan relevan dengan generasi muda. Ini menunjukkan perlunya revitalisasi budaya lokal melalui pendidikan dan kegiatan bersama yang menyasar pemuda.

6. Tantangan Sosial-Ekonomi dan Ketidaksetaraan

Isu ketimpangan sosial-ekonomi juga menjadi pemicu ketegangan yang tersisa. Informan dari wilayah pesisir mengeluhkan kurangnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak, sementara wilayah lain berkembang pesat. Beberapa bahkan merasa bahwa bantuan pasca-konflik tidak didistribusikan secara adil.

“Beta rasa banyak bantuan yang datang seng sampai ke orang kecil. Itu yang bikin iri hati dan bisa picu masalah baru.” (Informan: Bapak J, warga Negeri Rumah Tiga)

Kondisi ini menegaskan bahwa upaya membangun harmoni tidak cukup hanya melalui pendekatan budaya dan spiritual, tetapi juga harus dibarengi dengan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan.

7. Insiden Tial–Tulehu: Cerminan Luka yang Belum Sembuh

Insiden penganiayaan antara pemuda Tulehu dan Tial pada Maret 2025 menjadi pengingat bahwa ketegangan sosial masih rawan terjadi. Banyak informan menyangkan kejadian tersebut, dan menilai bahwa akar masalahnya bukan hanya soal kriminal, tetapi juga dipengaruhi oleh ketegangan sosial lama yang belum sepenuhnya teratasi.

“Itu masalah anak muda, tapi sebenarnya karena hubungan antardesa belum pulih betul. Kalau tidak cepat diselesaikan, bisa jadi besar lagi.” (Tokoh masyarakat Negeri Tial)

Peristiwa ini menunjukkan pentingnya pencegahan konflik melalui dialog terbuka, penguatan komunitas akar rumput, dan pendekatan yang sensitif terhadap sejarah relasi antar wilayah.

8. Minimnya Ruang Komunikasi dan Potensi Kekerasan Baru

Ketiadaan ruang dialog memperkuat apa yang disebut Johan Galtung sebagai *kekerasan struktural*—yakni kondisi sosial yang membatasi kemampuan kelompok untuk menyelesaikan konflik secara damai (Galtung, 1996). Informan menyatakan bahwa media sosial sering kali justru memperburuk konflik kecil karena tidak ada mekanisme penyalangan.

“Beta posting soal masalah di kampung, eh langsung jadi ribut,” ujar salah satu warga.

Tanpa forum komunikasi komunitas, seperti musyawarah adat atau dialog antar pemuda lintas desa, masyarakat tidak memiliki kanal aman untuk menyalurkan keluhan atau menyelesaikan konflik.

9. Perempuan sebagai Agen Damai

Peran perempuan sering kali tersembunyi namun sangat signifikan dalam pemulihan sosial. Teori *gender and peacebuilding* menyatakan bahwa perempuan memiliki potensi kuat dalam membangun jembatan sosial karena kedekatan mereka dengan isu keseharian dan komunitas (Lederach & Lederach, 2010).

Misalnya, kegiatan memasak bersama antar ibu-ibu dari komunitas Kristen dan Muslim menjadi ruang rekonsiliasi informal yang kuat. “Di dapur kita lupa agama, yang penting kerja sama,” kata Ibu T di Passo.

Ini membuktikan bahwa pendekatan perdamaian harus bersifat inklusif gender dan memperkuat peran informal yang sering tidak diakui dalam kebijakan formal.

10. Pendidikan dan Pembentukan Memori Damai

Dalam konteks Ambon, dunia pendidikan belum maksimal digunakan untuk membentuk narasi damai yang konstruktif. Paulo Freire dalam *Pedagogy of the Oppressed* (1970) menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat kesadaran kritis (*conscientization*) untuk memahami realitas sosial secara reflektif.

Namun para guru yang diwawancarai menghindari topik konflik karena takut memicu ketegangan. Ini menunjukkan masih ada ketakutan struktural yang menghambat pendidikan sebagai ruang rekonsiliasi.

“Beta seng berani cerita soal konflik, takut salah omong,” kata salah satu guru SD.

Padahal, kurikulum lokal bisa dimanfaatkan untuk menceritakan ulang sejarah lokal dengan cara yang membangun empati dan pemahaman lintas komunitas.

11. Keadilan Restoratif dan Legitimasi Sosial

Banyak warga menyuarakan kekecewaan terhadap sistem hukum formal yang dianggap lamban dan diskriminatif. Teori *justice as fairness* dari John Rawls (1971) menyatakan bahwa keadilan harus bersifat merata dan dapat diterima oleh semua kelompok. Ketika keadilan formal gagal, kepercayaan terhadap negara melemah.

“Kalau bukan anak pejabat, hukum cepat. Tapi kalau anak orang kuat, lama sekali,” ujar seorang warga Tial.

Model *restorative justice* yang berbasis nilai lokal seperti Pela Gandong sebenarnya bisa dijadikan alternatif. Menurut Zehr (2002), keadilan restoratif menekankan pemulihan hubungan dan partisipasi komunitas dalam menyelesaikan konflik, bukan hanya menghukum pelaku.

Kesimpulan

Penelitian ini menggali persepsi masyarakat Ambon terhadap konflik masa lalu dan harapan untuk harmoni sosial yang lebih baik setelah pengalaman trauma yang mendalam. Konflik yang terjadi antara tahun 1999–2002 meninggalkan bekas yang signifikan dalam kehidupan sosial, emosional, dan fisik masyarakat Ambon. Melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan, ditemukan bahwa meskipun ada upaya rekonsiliasi berbasis budaya lokal dan lintas agama, ketegangan sosial masih terkadang muncul dan memicu konflik baru.

Persepsi masyarakat terhadap harmoni tidak hanya dilihat sebagai ketiadaan konflik, tetapi sebagai kemampuan untuk hidup berdampingan dengan perbedaan. Proses rekonsiliasi memerlukan peran penting dari agama, tokoh adat, dan nilai-nilai lokal seperti *Pela Gandong* yang masih dijunjung tinggi meskipun beberapa pihak merasa bahwa nilai tersebut lebih simbolis daripada aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Ketidaksetaraan sosial-ekonomi, ketegangan identitas, dan masalah keadilan hukum juga menjadi faktor penghambat perdamaian yang berkelanjutan.

Generasi muda, meskipun tidak langsung mengalami konflik, mulai mengembangkan narasi baru tentang harmoni, sementara generasi tua masih dibayangi trauma. Oleh karena itu, upaya pembangunan perdamaian di Ambon harus bersifat inklusif, mengakomodasi generasi berbeda, serta mengedepankan keadilan sosial, penguatan komunikasi antar kelompok, dan pendidikan yang membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya perdamaian.

Untuk mencapai harmoni yang lebih nyata, diperlukan tindakan konkret yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, baik dari aspek sosial, budaya, agama, maupun ekonomi. Dengan demikian, pembangunan perdamaian pascakonflik di Ambon tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Abdullah, I. (2006). *Konflik dan integrasi di Sulawesi Selatan*. Lembaga Penelitian Universitas Gadjah Mada.
- Adam, J. (2010). *Cakalele dan Gong Perdamaian Dunia: Pergulatan Budaya Maluku Pasca Konflik*. Penerbit Buku Kompas.
- Azca, M. N. (2011). *After Jihad: A biographical approach to passion and jihad in Indonesia*. University of Amsterdam.
- Bertrand, J. (2004). *Nationalism and ethnic conflict in Indonesia*. Cambridge University Press.
- Harris, I. (2002). Peace education for a new century. *Social Alternatives*, 21(1), 3–6.
- Haris, S. (Ed.). (2010). *Desentralisasi dan otonomi daerah: Desentralisasi, demokratisasi, dan akuntabilitas pemerintahan daerah*. LIPI Press.
- Hasan, N. (2006). *Laskar Jihad: Islam, militancy, and the quest for identity in post-New Order Indonesia*. Cornell Southeast Asia Program.
- Komnas Perempuan. (2004). *Potret Kekerasan terhadap Perempuan dalam Situasi Konflik di Indonesia*. Komnas Perempuan.
- Latumahina, F. E. (2013). Pendidikan perdamaian di Ambon: Studi atas praktik pendidikan lintas iman. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 17(1), 60–75.

Lapian, A. (2015). Revitalisasi Pela Gandong dalam membangun perdamaian di Maluku. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 36(1), 45–57.

Leirvik, O. (2004). *Interfaith dialogue: Ethical perspectives and interreligious hospitality*. Rodopi.

Mujiburrahman. (2008). *Feeling threatened: Muslim-Christian relations in Indonesia's New Order*. Amsterdam University Press.

Rahail, S. (1993). *Masohi: Sistem sosial budaya orang Maluku*. Yayasan Obor Indonesia.

Rumah, S., & Noya, E. (2016). Transformasi budaya Pela Gandong dalam membangun kohesi sosial masyarakat Maluku. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 18(3), 367–382.

Suleeman, Y. (2018). Reaktualisasi nilai-nilai masohi dalam membangun perdamaian pasca konflik. *Jurnal Kajian Budaya*, 12(2), 115–128.

Sumampouw, J. (2007). *Mengenal konflik Ambon: Menyemai damai di bumi Maluku*. Interseksi Foundation.